

ASPIRASI **kita**

Fraksi PKS Jatim
Ucapkan Selamat kepada
Khofifah-Emil:



**Siap Bersinergi
Membangun**

**Jawa Timur
Lebih Sejahtera**

EDISI 2 JANUARI-FEBRUARI 2025



FRAKSI PKS DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

**UCAPKAN SELAMAT
KEPADA KHOFIFAH-
EMIL SEBAGAI
GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR
TERPILIH**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mengucapkan selamat kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 dalam sidang paripurna DPRD Jatim



Fraksi PKS juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintahan provinsi agar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, terutama dalam hal kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan. “Kami di Fraksi PKS akan tetap siap menjadi mitra strategis untuk bersama-sama membangun Jawa Timur. Kami berharap sinergi yang baik dapat terjalin demi kemajuan Jawa Timur,” tambahnya.

**PKS
KONSOLIDASIKAN
LEGISLATOR SE-
JAWA TIMUR:
TEGASKAN KOMITMEN
BANGUN JAWA TIMUR
YANG LEBIH BAIK**

Ratusan legislator PKS se-Jawa Timur melakukan konsolidasi besar pada Minggu (9/2/2025). Pertemuan ini menegaskan komitmen PKS untuk membangun Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.



Sebanyak 114 anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir dari seluruh Jawa Timur. Dalam acara ini, hadir 104 anggota DPRD kabupaten/kota, 5 anggota DPRD Jawa Timur, dan 5 anggota DPR RI dari PKS Jatim. Mereka berdiskusi dan menyusun strategi bersama untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur.



Menurutnya, konsolidasi ini bukan sekadar pertemuan, tetapi langkah strategis untuk menyamakan visi, memperkuat sinergi, dan memastikan perjuangan legislasi benar-benar berdampak nyata bagi rakyat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dari parlemen benar-benar membela kepentingan rakyat. Dengan soliditas yang kuat, PKS siap menjadi bagian penting dalam pembangunan Jawa Timur yang lebih baik,” tambah pria yang kerap dipanggil Kang Irwan ini.

“
Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan, menegaskan bahwa seluruh legislator PKS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan di Jawa Timur berjalan dengan baik, adil, dan merata. “PKS tidak hanya hadir di parlemen untuk berbicara, tapi untuk bekerja dan membawa solusi bagi masyarakat. Melalui kebijakan yang tepat, kita ingin membangun Jawa Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tegas Irwan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, juga menegaskan pentingnya sinergi antarlegislator dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. "Sebagai wakil rakyat, kita harus memastikan bahwa kebijakan yang kita buat tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sinergi ini adalah kunci agar pembangunan di Jawa Timur berjalan lebih cepat dan lebih merata," ujar Lilik.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan setiap program yang diperjuangkan dapat direalisasikan dengan baik.



Selain membahas strategi legislasi, acara ini juga menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat realisasi program-program pro-rakyat di setiap daerah. Dengan semangat kebersamaan dan keberpihakan pada rakyat, PKS optimis mampu membawa perubahan signifikan bagi Jawa Timur. Konsolidasi ini diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta mempercepat lahirnya kebijakan-kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.



**BPKK KUNJUNGI
FRAKSI PKS JATIM,
BAHAS PENANGANAN
KEKERASAN PADA
PEREMPUAN HINGGA
TINGGINYA ANGKA
PERCERAIAN**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Jawa Timur pada Kamis (24/1/2025). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jatim, Lilik Hendarwati, yang didampingi oleh sekretaris fraksi, Puguh Wiji Pamungkas.

Diskusi dalam pertemuan ini menyoroti isu-isu sosial utama yang tengah menjadi perhatian di Jawa Timur, termasuk tingginya angka perceraian, kekerasan terhadap perempuan, bullying, dan pernikahan dini. Lina Ariani, Ketua BPKK PKS Jatim dalam kunjungannya menyampaikan berbagai keresahannya terhadap potret keluarga di Jawa Timur. Ia menjelaskan, indeks ketahanan keluarga di Jawa Timur di 2023 hanya di angka 61,8 %. Sementara data perceraian di 2023 sebesar 33,57 ribu kasus dan menempati nomor dua terbesar di Indonesia. "Kekerasan terhadap perempuan 482 kasus, kekerasan pada anak 816 kasus. Darurat perkawinan anak, sebanyak 24.688 anak menikah dengan dispensasi. Ada lagi kasus perdagangan perempuan, juga masih ada kekerasan pada pekerja perempuan," kata Lina miris. Ia kemudian berharap berbagai permasalahan perempuan itu mendapat kawalan dari Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur.

Ketua Fraksi PKS Jatim, Lilik Hendarwati, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan tersebut. "Alhamdulillah, hari ini kami sepakat untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan BPKK PKS Jawa Timur. Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan beberapa program strategis, salah satunya adalah Gerakan Sekolah Pranikah," ujarnya.

Program Gerakan Sekolah Pranikah dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai kesiapan membangun rumah tangga yang harmonis dan tangguh. Program ini akan diimplementasikan di seluruh RKI (Rumah Keluarga Indonesia) di Jawa Timur, sebuah program dari BPKK PKS Jatim yang sudah tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Implementasi program ini akan melibatkan kerja sama lintas sektoral, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Komnas Perlindungan Anak.

"Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang komprehensif dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Jawa Timur, sehingga kasus perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir," tambah Lilik.

Sementara Sekretaris Fraksi PKS Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, juga menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. Ia menegaskan komitmen Fraksi PKS Jatim untuk terus mendukung program-program yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat. "Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa PKS tidak hanya hadir saat momentum politik, tetapi juga bergerak aktif dalam program-program yang memberikan dampak positif langsung pada masyarakat," jelas Puguh.

Pertemuan ini menggarisbawahi keseriusan Fraksi PKS Jatim dan BPKK PKS Jatim dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial, terutama yang menyangkut perempuan dan keluarga. Dengan kolaborasi ini, diharapkan masyarakat Jawa Timur dapat merasakan perubahan nyata menuju lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan sejahtera. Dalam kesempatan itu, Lina didampingi oleh Sekbid Heru Sri Kusumayanti, Deputi Ketahanan Keluarga (KK) Rokhmatun, Deputi Hubungan Kelembagaan Perempuan (HKP) Sri Oetami, Deputi Kajian Erna Diana K, Mega serta, Deputi Peningkatan Kapasitas Anggota Perempuan (PKAP) Nur Faizah A.



FRAKSI PKS DPRD JATIM

TERIMA ASPIRASI FORUM MASYARAKAT MARITIM MADANI TERKAIT PENOLAKAN REKLAMASI

Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menerima kunjungan Forum Masyarakat Maritim Madani (FM3) pada Jumat (31/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, FM3 menyampaikan aspirasi terkait perjuangan mereka dalam menolak reklamasi di wilayah pesisir Surabaya.

Selain membahas strategi legislasi, acara ini juga menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat realisasi program-program pro-rakyat di setiap daerah. Dengan semangat kebersamaan dan keberpihakan pada rakyat, PKS optimis mampu membawa perubahan signifikan bagi Jawa Timur. Konsolidasi ini diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta mempercepat lahirnya kebijakan-kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Mereka ingin menyampaikan aspirasi terkait penolakan reklamasi, sekaligus meminta dukungan agar DPRD Jawa Timur memberikan kesempatan bagi mereka untuk didengar. Mereka menitipkan surat untuk Ketua DPRD. In syaa Allah akan kami sampaikan,” ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu.



Selain membahas strategi legislasi, acara ini juga menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat realisasi program-program pro-rakyat di setiap daerah. Dengan semangat kebersamaan dan keberpihakan pada rakyat, PKS optimis mampu membawa perubahan signifikan bagi Jawa Timur. Konsolidasi ini diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta mempercepat lahirnya kebijakan-kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

KETUA FRAKSI PKS LILIK HENDARWATI APRESIASI MAHASISWA YANG BERDEMO DI DPRD JATIM:

ASPIRASI MEREKA PENTING UNTUK RAKYAT

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (17/2/2025). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka terkait efisiensi anggaran pemerintah Prabowo-Gibran, yang dinilai berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Lilik, yang turun langsung menemui mahasiswa bersama anggota DPRD lainnya, menyebut bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian intelektual muda terhadap kebijakan pemerintah. "Mahasiswa adalah kaum intelektual yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Saya mengapresiasi mereka yang menyampaikan aspirasi terkait pemangkasan anggaran, termasuk di sektor pendidikan. Ini menunjukkan bahwa mereka kritis terhadap kebijakan yang bisa berdampak luas," ujar Lilik. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pemangkasan anggaran hingga 50% di beberapa kementerian, termasuk pendidikan. Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan beasiswa, serta ketidakstabilan layanan publik lainnya.





sumber ig @eyelens.sub

Lilik menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Jatim akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tidak merugikan masyarakat. "Kami di Fraksi PKS akan terus melakukan monitoring agar pemangkasan anggaran ini tidak berdampak negatif, terutama bagi pekerja dan mahasiswa penerima beasiswa.

Kami mendukung kebijakan pemerintah yang baik, tetapi tetap harus ada pengawasan agar tidak merugikan masyarakat kecil," tegasnya. "Kami di Fraksi PKS akan terus melakukan monitoring agar pemangkasan anggaran ini tidak berdampak negatif, terutama bagi pekerja dan mahasiswa penerima beasiswa. Kami mendukung kebijakan pemerintah yang baik, tetapi tetap harus ada pengawasan agar tidak merugikan masyarakat kecil," tegasnya.



Dalam aksi tersebut, mahasiswa awalnya ingin berdialog dengan anggota dewan yang menemui mereka. Namun, mereka kemudian meminta bertemu langsung dengan Ketua DPRD Jatim. Setelah menunggu beberapa saat, Ketua DPRD hadir dan demonstrasi berjalan dengan lancar, meski sempat terjadi sedikit ketegangan.

Lilik berharap mahasiswa tetap menjaga sikap santun dalam menyampaikan aspirasi.

“Aksi mahasiswa ini penting dan harus diapresiasi, tetapi saya berharap semuanya tetap dilakukan dengan baik dan tertib. Jangan sampai terjadi keributan yang membahayakan keselamatan mereka maupun orang lain. Tetap semangat menjaga NKRI, karena kalian adalah calon pemimpin masa depan,” pungkasnya.





KETUA FSPMI:

**FRAKSI PKS JATIM
KONSISTEN BELA
HAK RAKYAT,
KAMI PERCAYA
MEREKA!**

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Surabaya, Slamet Raharjo, menegaskan kepercayaannya kepada Fraksi PKS DPRD Jawa Timur dalam membela hak-hak pekerja.

Hal ini disampaikan setelah ia bersama sejumlah pekerja Hotel Tunjungan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak mengadu ke Fraksi PKS, Senin (17/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, Slamet menyoroti bahwa manajemen Hotel Tunjungan tidak menjalankan proses PHK sesuai aturan yang berlaku.

“PHK harus melalui perundingan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Namun, hal itu diabaikan oleh manajemen hotel,” ujarnya.

Ia pun menaruh harapan besar kepada Fraksi PKS yang selama ini dikenal konsisten membela hak-hak pekerja dan rakyat kecil.

“Selama ini kawan-kawan PKS selalu memperjuangkan hak-hak buruh dan kaum pekerja. Karena itu, kami percaya kepada mereka dan berharap ada tindak lanjut nyata agar kawan-kawan bisa kembali bekerja atau mendapatkan hak mereka secara adil,” tegasnya. Menanggapi aduan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, memastikan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini dan mengupayakan solusi terbaik.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja agar ada penyelesaian yang adil bagi para pekerja. PHK tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak karyawan,” ujar Lilik.

Para pekerja yang telah mengabdikan selama belasan hingga puluhan tahun di Hotel Tunjungan berharap agar perjuangan ini membuahkan hasil. Dengan adanya advokasi dari Fraksi PKS, mereka yakin suara mereka tidak akan diabaikan, dan keadilan bagi pekerja bisa ditegakkan.

Kasus ini kembali menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Jatim tetap berada di garis perjuangan rakyat, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja yang kerap terabaikan.

LILIK
HENDARWATI



KETUA FRAKSI PKS DPRD PROVINSI JATIM



HJ. LILIK HENDARWATI

KOMISI C (KEUANGAN)

**BADAN ANGGARAN (BANGGAR)
BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)**



**ANGGOTA
DPRD JATIM
LILIK
HENDARWATI:
KOMUNIKASI
WARGA DAN
WAKIL RAKYAT,
SALAH SATU
KUNCI
PEMBANGUNAN
DAERAH**

Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Surabaya pada Sabtu (15/2/2025).

Menurut Lilik, masyarakat harus aktif dalam menyampaikan aspirasi serta memastikan program-program pemerintah benar-benar tersalurkan dengan baik.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu juga mengajak warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk dalam menjaga keamanan bersama.

“Misalnya, jika ada orang yang mencurigakan di sekitar kita, tetangga harus peduli, menanyakan keperluannya, dan bersama-sama menjaga keamanan. Ini adalah tugas bersama,” ujar Lilik. Selain soal keamanan, Lilik juga menegaskan bahwa wakil rakyat memiliki peran dalam memastikan program pemerintah tersampaikan kepada yang berhak. “Jika ada yang belum menerima bantuan atau program pemerintah, monggo disampaikan. Kami siap membantu menyalurkan dan memastikan program ini bisa diakses oleh masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk nyata peran DPRD dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, Lilik mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan proposal ke pemerintah terkait berbagai program, termasuk fasilitas olahraga. “Beberapa waktu lalu, saya menyampaikan proposal yang diajukan masyarakat ke pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas olahraga yang lebih memadai,” katanya.

Tak hanya itu, di berbagai daerah lain, program bantuan seperti sound system, seragam, serta insentif untuk guru ngaji, imam, dan marbot juga telah berhasil ia salurkan. Lilik menekankan bahwa dengan komunikasi yang baik, aspirasi warga dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. “Keinginan dan ide masyarakat bisa masuk ke dalam perencanaan pembangunan ketika ada komunikasi yang baik antara wakil rakyat dan masyarakat. Aspirasi ini bisa menjadi pokok-pokok pikiran dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat,” jelasnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, Lilik berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya berperan aktif dalam pembangunan dan pemanfaatan program-program pemerintah. Baginya, komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat adalah kunci utama dalam menciptakan daerah yang lebih maju dan sejahtera.



**DARI SEKOLAH NEGERI
HINGGA
INFRASTRUKTUR,
WARGA JERUK DAN
SAMBIKEREP
SAMPAIKAN
ASPIRASI KE LILIK
HENDARWATI**

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 1 Surabaya, Lilik Hendarwati, menggelar kegiatan reses di beberapa titik, salah satunya di Kelurahan Jeruk, Lakarsantri, dan Kelurahan Sambikerep pada Sabtu, 22 Februari 2025. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat yang hadir karena dianggap sebagai wujud nyata kepedulian wakil rakyat terhadap aspirasi warga. Reses pertama berlangsung di Balai RW 1 Kelurahan Jeruk dan dihadiri oleh warga setempat. Dalam sesi diskusi, masyarakat menyampaikan beberapa permasalahan utama yang mereka hadapi.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah permohonan pembangunan SMA dan SMK negeri di wilayah Jeruk, mengingat saat ini belum ada sekolah negeri di sana. Warga berharap adanya sekolah negeri agar anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk bersekolah dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, Ketua Takmir Masjid Al Fatah menyampaikan permohonan bantuan renovasi sanitasi masjid, termasuk tempat wudhu dan toilet. Warga juga mengusulkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi banjir di RW 1 yang sering terjadi saat hujan deras. Permintaan lainnya meliputi fasilitas untuk kegiatan pengajian, seperti seragam, alat musik rebana, dan perlengkapan lainnya.



Menanggapi aspirasi tersebut, legislator PKS itu menyatakan akan mengawal usulan-usulan tersebut agar bisa masuk dalam APBD 2026. "Saya minta warga untuk mengajukan permohonan secara resmi agar bisa kami perjuangkan dalam pokok-pokok pikiran dewan. Insya Allah, kita upayakan agar bisa terealisasi," ujarnya.

Di titik kedua, yakni Kelurahan Sambikerep, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi. Salah satu isu yang dibahas adalah kesetaraan ijazah bagi santri pondok pesantren salafiyah yang tidak mendapatkan pendidikan umum. Lilik menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan ujian paket (A, B, dan C) agar santri tetap bisa mendapatkan sertifikasi pendidikan yang diakui.

Selain itu, warga Sambikerep mengusulkan pemanfaatan aset tanah milik Pemkot Surabaya untuk kegiatan olahraga masyarakat. Lilik berjanji akan berkoordinasi dengan anggota dewan kota untuk mengawal aspirasi tersebut. Masalah lain yang diangkat adalah transparansi penggunaan Dana Kelurahan (Dakel). Warga meminta agar anggaran tersebut dapat dikelola secara lebih terbuka dan dipublikasikan kepada masyarakat. Terkait infrastruktur, warga mengeluhkan box culvert yang belum tertutup sepenuhnya, sehingga membahayakan pengguna jalan. Mereka juga menyoroti beberapa proyek pembangunan yang masih mangkrak. Lilik menegaskan akan meneruskan masalah tersebut ke pemerintah kota agar segera mendapatkan solusi.

Dalam kegiatan reses ini, Lilik Hendarwati juga menjelaskan pentingnya memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi majelis taklim agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia menekankan bahwa pengajuan bantuan perlu dilakukan sesuai prosedur agar dapat masuk dalam program bantuan provinsi. Masyarakat di Jeruk dan Sambikerep menyambut baik kegiatan reses ini, mengingat selama ini mereka jarang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada wakil rakyat. Mereka berharap agar komunikasi antara masyarakat dan anggota dewan terus terjalin dengan baik untuk memastikan aspirasi mereka diperjuangkan.

Lilik Hendarwati menegaskan bahwa reses merupakan wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhannya. "Komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan daerah," tutupnya.



ANGGOTA DPRD JATIM LILIK HENDARWATI

SOROTI KECANDUAN GADGET PADA ANAK DALAM SOSIALISASI PENDIDIKAN KARAKTER

Kecanduan gadget pada anak-anak menjadi perhatian serius Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati. Kekhawatiran ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Pendidikan Karakter pada Anak untuk Menghindari Kecanduan Gadget yang digelar Sabtu (25/1/2025). Lilik menyebut tema 'Pendidikan Karakter pada Anak untuk Menghindari Kecanduan Gadget' ini sangat penting untuk orang tua yang mendidik anak-anaknya di era digital. Apalagi, kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dari Kecamatan Wonokromo, seperti RT, RW, ustaz/ustazah, guru, dan anggota karang taruna.

“Mereka ini tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga berbagai nilai baik yang didapat dalam kegiatan ini, akan lebih mudah tersebar di masyarakat,” harapnya.

Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Ivana Sajogo, SpKJ (K), menjelaskan bahwa salah satu penyebab meningkatnya mental illness pada anak-anak dan remaja adalah kurangnya hubungan harmonis antara orang tua dan anak.

“Hubungan yang hangat antara orang tua dan anak adalah pondasi penting dalam mencegah anak-anak mencari pelarian melalui gadget secara berlebihan,” ungkapnya. Lilik Hendarwati, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, dalam paparannya menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai benteng pertama dalam pendidikan karakter anak.



Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian anak dan melindungi mereka dari dampak negatif kecanduan teknologi. “Keluarga yang harmonis dan penuh nilai-nilai positif adalah kunci utama membangun karakter anak yang tangguh. Orang tua harus menjadi teladan sekaligus pendamping yang bijak dalam membatasi penggunaan gadget pada anak,” ujar Lilik.

Dalam sambutannya kepada para peserta, Lilik memberikan apresiasi kepada tokoh masyarakat yang hadir dan mendorong peran aktif mereka dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak. “Kami sangat menghargai peran tokoh masyarakat dalam menjaga nilai-nilai positif di lingkungan.





Kehadiran Anda semua menjadi panutan yang membawa pengaruh besar bagi generasi muda. Mohon terus memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak-anak di sekitar kita. Mereka adalah aset masa depan yang perlu dijaga, dibimbing, dan dilindungi," tegas Lilik.

Acara ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, di mana banyak peserta berbagi pengalaman mereka dalam mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi praktis dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter sejak dini untuk menghadapi tantangan era digital.

WIJI PAMUNGKAS PUGUH



SEKRETARIS FRAKSI PKS DPRD PROVINSI JATIM



**DRH. H. PUGUH WIJI
PAMUNGKAS, MM**

KOMISI E (KESRA)

BADAN KEHORMATAN (BK)



**HADIRI
KHOTMIL
QURAN,
PUGUH WIJI
PAMUNGKAS
DPRD JATIM
SEBUT IBU
ADALAH
LUMBUNG
KEHIDUPAN**

Malang – Pegiat perempuan sadar Al-Quran atau yang menamakan dirinya sebagai Quran Squad pada sabtu (11/1/2025) menggelar khotmil Quran dan safari masjid yang digelar di Masjid Darussalam Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Komunitas yang seluruh anggotanya adalah ibu-ibu tersebut secara rutin menggelar khotmil Quran sebagai wujud dari kecintaanya pada Al-Quran.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir dan memberikan ceramahnya H. Puguh Wiji Pamungkas anggota DPRD Jawa Timur yang didampingi oleh pembina Quran Squad Ustadz Abullah Azzam dan Ketua Takmir Masjid Darussalam Letkol Nuril.

Dalam sesinya Puguh menyampaikan apresiasinya yang tinggi atas terbentuknya komunitas perempuan pencinta Al-Quran ini, sekaligus menurutnya menjadi solusi atas kondisi sosial yang hari ini terjadi.

“Ibu-ibu adalah lumbung dan lambang bagi kehidupan, ibu adalah pusara bagi kebagusan akhlak dan pekerti seluruh isi rumahnya. Jika ibu-ibu membiasakan diri membaca Al-quran dan menghidupkan kehiasaan itu ditengah rumah maka hal ini akan memberikan vibrasi positif bagi seluruh orang yang ada di rumah,” jelas Puguh

“Jika di dalam rumah baik, maka anak-anak dan seluruh orang yang ada dirumah akan terlahir menjadi generasi yang baik. Kalau sudah generasinya baik, maka lingkungan masyarakatpun akan baik dan bangsapun akan baik juga”, tambahnya.

Puguh juga menyebutkan akar permasalahan dari masalah sosial yang hari ini terjadi seperti bullying, kekerasan pada perempuan dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, sumber masalahnya adalah pada keluarga dan lingkungan.

“Jika komunitas seperti Perempuan sadar Quran ini ada di seluruh penjuru Indonesia, maka bisa dipastikan potensi permasalahan sosial yang timbul akan bisa di reduksi”, jelas Puguh di hadapan puluhan jamaah ibu-ibu yang hadir

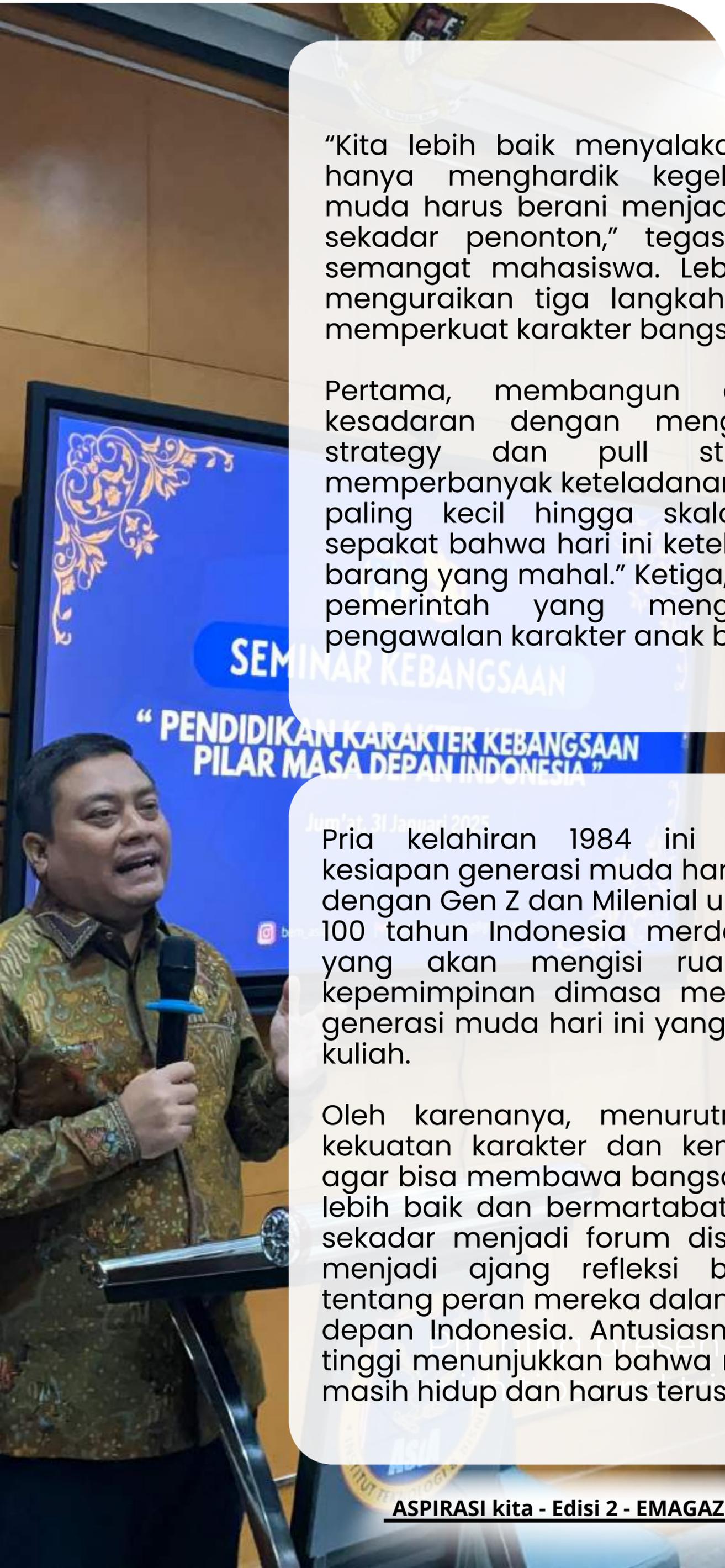


**BERI SEMINAR
KEBANGSAAN, PUGUH WIJI
PAMUNGKAS TANTANG
MAHASISWA JADI PELOPOR
KARAKTER BANGSA**

Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin menantang, karakter kebangsaan menjadi aset utama bagi generasi muda. Tidak sekadar teori, hal ini ditegaskan langsung oleh Puguh Wiji Pamungkas, anggota DPRD Jawa Timur.

Legislator PKS itu banyak memberi pesan pada ratusan mahasiswa yang hadir di Seminar Kebangsaan bertajuk "Pendidikan Karakter Kebangsaan, Pilar Masa Depan Indonesia" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kampus ASIA Malang, Jumat (31/1/2025) itu.

Puguh menyampaikan pesan mendalam tentang urgensi menjaga moralitas dan nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud tanpa pondasi karakter yang kuat.



“Kita lebih baik menyalakan lilin daripada hanya menghardik kegelapan. Generasi muda harus berani menjadi pelopor, bukan sekadar penonton,” tegasnya, membakar semangat mahasiswa. Lebih lanjut, Puguh menguraikan tiga langkah strategis untuk memperkuat karakter bangsa.

Pertama, membangun awareness atau kesadaran dengan menggunakan push strategy dan pull strategy. Kedua, memperbanyak keteladanan dari lingkungan paling kecil hingga skala negara. “Kita sepakat bahwa hari ini keteladanan menjadi barang yang mahal.” Ketiga, adanya regulasi pemerintah yang menguatkan proses pengawalan karakter anak bangsa.

Pria kelahiran 1984 ini juga menyoroti kesiapan generasi muda hari ini yang disebut dengan Gen Z dan Milenial untuk menyambut 100 tahun Indonesia merdeka. Menurutnya yang akan mengisi ruang peran dan kepemimpinan dimasa mendatang adalah generasi muda hari ini yang duduk dibangku kuliah.

Oleh karenanya, menurutnya, dibutuhkan kekuatan karakter dan kemantapan moral agar bisa membawa bangsa ini kearah yang lebih baik dan bermartabat. Seminar ini tak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi ajang refleksi bagi mahasiswa tentang peran mereka dalam menjaga masa depan Indonesia. Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan bahwa nilai kebangsaan masih hidup dan harus terus diperjuangkan.



**PUGUH WIJI
PAMUNGKAS:
SERAP
ASPIRASI
MASYARAKAT
JADI KUNCI
PEMBENTUKAN
PERDA DI DPRD
JATIM**

Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa serap aspirasi masyarakat memiliki peran krusial dalam proses pembentukan peraturan daerah (Perda).

Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Kota Malang beserta pengurus Ikatan Pemuda Muhammadiyah 1 Kota Malang dan jajaran guru mereka di DPRD Jatim, Rabu (5/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim ini menjelaskan tugas dan fungsi anggota DPRD, termasuk peran mereka dalam menginisiasi kebijakan daerah.

Ia menekankan bahwa setiap anggota DPRD diberikan kesempatan tiga kali dalam setahun melalui program reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perda. "Salah satu peserta bertanya apakah DPRD Jatim melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Jawabannya adalah iya. Aspirasi masyarakat yang kami serap melalui reses kemudian dikaji dan dijadikan prioritas, apakah perlu ditindaklanjuti menjadi Perda," ujar Puguh.



Pria kelahiran 1984 ini juga menyoroti kesiapan generasi muda hari ini yang disebut dengan Gen Z dan Milenial untuk menyambut 100 tahun Indonesia merdeka. Menurutnya yang akan mengisi ruang peran dan kepemimpinan dimasa mendatang adalah generasi muda hari ini yang duduk dibangku kuliah.

Oleh karenanya, menurutnya, dibutuhkan kekuatan karakter dan kemantapan moral agar bisa membawa bangsa ini kearah yang lebih baik dan bermartabat. Seminar ini tak sekedar menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi ajang refleksi bagi mahasiswa tentang peran mereka dalam menjaga masa depan Indonesia. Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan bahwa nilai kebangsaan masih hidup dan harus terus diperjuangkan.

HARISANDI SAVARI



BENDAHARA FRAKSI PKS DPRD PROVINSI JATIM



**HARISANDI SAVARI,
S.PT, ST**

KOMISI D (PAMBANGUNAN)

BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)



**HARISANDI
SAVARI
ANGGOTA
DPRD JATIM
ROGOH KOCEK
PRIBADI BERI
BANTUAN 2
LAPTOP UNTUK
YAYASAN DI
PAMEKASAN**

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Anggota DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari memberikan bantuan 2 unit laptop untuk Madrasah Tsanawiyah Khairul Falah, Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura. Pemberian dua unit laptop merek Asus itu diterima langsung oleh Ketua Yayasan Khairul Falah, KH A Bushairi pada Sabtu (11/1/2025).

Harisandi Savari mengatakan, pemberian bantuan 2 laptop ini murni pakai uang pribadi. Dia mengaku peduli terhadap kendala yang dialami Yayasan Khairul Falah mengenai kekurangan sarana dan prasarana seperti laptop yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pendidikan.

"Saya berinisiatif bagaimana secepatnya keberhasilan pendidikan di lembaga ini bisa dilaksanakan dan teratasi," kata Harisandi Savari, Selasa (14/1/2025). Menurut pria yang akrab disapa Haris itu, keberhasilan program pendidikan tidak lepas dari sarana dan prasarana yang memadai.

Mengacu dari itu, menjadi keharusan bagi dirinya sebagai anggota DPRD Jatim asal Pamekasan untuk membantu tanpa harus berpikir panjang. Harisandi Savari mengatakan, pemberian bantuan 2 laptop ini murni pakai uang pribadi. Dia mengaku peduli terhadap kendala yang dialami Yayasan Khairul Falah mengenai kekurangan sarana dan prasarana seperti laptop yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pendidikan.

"Saya berinisiatif bagaimana secepatnya keberhasilan pendidikan di lembaga ini bisa dilaksanakan dan teratasi," kata Harisandi Savari, Selasa (14/1/2025). Menurut pria yang akrab disapa Haris itu, keberhasilan program pendidikan tidak lepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Mengacu dari itu, menjadi keharusan bagi dirinya sebagai anggota DPRD Jatim asal Pamekasan untuk membantu tanpa harus berpikir panjang.

SURAMADU DIROBOHKAN? HARISANDI SAVARI: ITU NGAWUR!

Wacana dari sebagian warga Surabaya yang ingin merobohkan Jembatan Suramadu akibat maraknya aksi kriminal di jalur penghubung Surabaya-Madura ini mendapat tanggapan tegas dari Anggota Komisi D DPRD Jatim, Harisandi Savari.

Menurutnya, gagasan tersebut tidak masuk akal dan bukan solusi yang tepat. "Kami paham, banyak yang kesal karena sering terjadi kejadian tak diinginkan di Suramadu. Tapi solusinya bukan dengan merobohkan jembatan. Itu ngawur!" tegas Harisandi.

Politisi asal Madura ini menegaskan, keresahan akibat aksi kriminal di Suramadu bukan hanya dirasakan oleh warga Surabaya, tetapi juga oleh masyarakat Madura secara umum.



Ia menyebut, pihaknya telah berulang kali meminta pemerintah dan aparat terkait untuk menindak tegas para pelaku kejahatan di jembatan tersebut. "Kami sudah sering mengingatkan soal indikasi pembegalan dengan senar pancing atau nilon, serta pencurian kendaraan di Suramadu. Kasus terakhir yang menimpa pengendara harus menjadi peringatan serius," ujar anggota DPRD Jatim dari dapil Madura itu.

Meski demikian, Harisandi menekankan bahwa tindak kriminal ini dilakukan oleh segelintir orang yang memang berniat jahat, bukan cerminan dari masyarakat Madura secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat yang saat ini memiliki kewenangan penuh atas Jembatan Suramadu untuk segera meningkatkan keamanan dengan langkah konkret.

"Solusi yang dibutuhkan adalah peningkatan keamanan, bukan merobohkan jembatan. Pemerintah pusat harus segera bertindak, misalnya dengan menambah pos keamanan, memasang CCTV di titik rawan, dan meningkatkan patroli di sepanjang jembatan," tegasnya. Harisandi mengingatkan bahwa keberadaan Suramadu bertujuan untuk pemerataan infrastruktur dan perekonomian antara Surabaya dan Madura.

Ia berharap, pemerintah segera meredam kekhawatiran masyarakat dengan menghadirkan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan pengendara.

"Suramadu ini aset penting bagi Jawa Timur. Tinggal bagaimana pemerintah pusat bisa menekan kekhawatiran pengendara, bukan malah menghilangkan jembatannya," pungkasnya.



**DPRD JATIM
TEGAS TOLAK
REKLAMASI,
HARISANDI
SAVARI:
KAMI AKAN
BELA
KEPENTINGAN
RAKYAT**

Komisi D DPRD Jawa Timur menegaskan sikapnya dalam menolak proyek reklamasi pesisir timur Jawa Timur yang menuai banyak penolakan dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PKS, Harisandi Savari, usai menerima audiensi dari Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) di Gedung DPRD Jatim.

“Kami di Komisi D menerima banyak aduan dari masyarakat, mulai dari petani tambak, nelayan, hingga akademisi, yang menyuarakan keresahan mereka terhadap proyek reklamasi ini. Proyek senilai Rp72 triliun ini dinilai mengancam mata pencaharian masyarakat sekitar. Kami berkomitmen untuk membela kepentingan rakyat dan menolak reklamasi ini,” ujar legislator PKS ini. Dalam audiensi tersebut, turut hadir perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.

Dari pertemuan itu terungkap bahwa izin proyek reklamasi ini dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat tanpa melalui pemerintah provinsi, sehingga menimbulkan polemik di tingkat daerah. "Banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat proyek ini. Kami akan membawa permasalahan ini ke Komisi IV DPR RI untuk memastikan langkah selanjutnya. Yang jelas, suara rakyat menjadi prioritas kami, dan kami akan terus mengawal aspirasi mereka," tegasnya. Penolakan terhadap reklamasi tidak hanya datang dari kelompok masyarakat pesisir, tetapi juga lebih dari 30 elemen lainnya, termasuk akademisi, aktivis lingkungan, dan pemerintah daerah.



Bahkan, Wali Kota setempat telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk meminta evaluasi terhadap proyek ini. "Melihat kuatnya gelombang penolakan dari berbagai pihak, kemungkinan proyek ini dihentikan. Jika tetap dipaksakan, proyek ini bisa memicu gejolak sosial di wilayah pesisir. Oleh karena itu, kami mendesak agar kebijakan ini dikaji ulang demi kepentingan masyarakat," lanjut Harisandi.

Dengan sikap tegas ini, DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak dan memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat. "Kami tidak ingin proyek ini hanya menguntungkan segelintir pihak sementara masyarakat kecil menanggung dampaknya. DPRD Jatim akan terus mengawal persoalan ini agar keadilan tetap terjaga," pungkasnya.

AGUS CAHYONO



BENDAHARA FRAKSI PKS DPRD PROVINSI JATIM

“

**H AGUS CAHYONO,
SHI, MHI**

KOMISI A (PAMERINTAHAN)

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (BAPEMPERDA)**



GELAR PROGRAM 'PAK DEWAN CURHAT DONG', AGUS CAHYONO: PELAKU UMKM KELUHKAN SULITNYA PERIZINAN

Dalam program Pak Dewan Curhat Dong yang digelar Sabtu (25/1/2025), pelaku UMKM menyampaikan berbagai keluhan kepada Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono.

Lebih dari 50 pelaku usaha dari sektor kuliner, properti, laundry, percetakan, hingga penyedia layanan internet hadir dalam diskusi yang berlangsung di Sultan Resto ini.

Keluhan utama yang muncul adalah rumitnya regulasi dan perizinan yang kerap menjadi hambatan besar bagi UMKM, terutama bagi mereka yang baru merintis usaha. Agus Cahyono menyoroti bahwa sistem perizinan yang ada saat ini dinilai terlalu kompleks.

“Banyak pelaku UMKM merasa kewalahan dengan prosedur dan jumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Ini menjadi tantangan berat, terutama bagi mereka yang masih merintis usaha dari nol,” ujarnya. Selain itu, para pelaku usaha berharap adanya kebijakan yang lebih toleran terhadap perizinan, khususnya bagi usaha kecil yang baru berkembang.

Agus menilai, diperlukan langkah-langkah yang lebih fleksibel untuk mendukung UMKM agar dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang memberatkan. Tidak hanya soal perizinan, pelaku UMKM juga mengeluhkan risiko berurusan dengan aparat penegak hukum akibat dokumen yang belum lengkap atau masih dalam proses. Kondisi ini menciptakan keresahan tersendiri, terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki banyak sumber daya.

Masalah lain yang disoroti adalah lambatnya pelayanan dalam penerbitan izin usaha. Meski persyaratan telah dipenuhi, waktu tunggu yang panjang sering kali mengganggu kelancaran operasional UMKM. Hal ini ditambah dengan keluhan dari sektor kuliner terkait pajak restoran sebesar 10% yang dirasa sangat memberatkan, terutama di tengah rendahnya daya beli masyarakat. Banyak pelaku usaha terpaksa menutupi pajak tersebut dari margin keuntungan mereka, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan usaha. Meski kebutuhan akses permodalan juga disinggung, banyak pelaku UMKM menilai bahwa permasalahan utama yang harus segera diselesaikan adalah terkait regulasi dan perizinan.

Agus Cahyono menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti berbagai keluhan ini. “Saya akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan OPD terkait untuk mencari solusi terbaik. Jika diperlukan, saya akan memfasilitasi pertemuan langsung antara pelaku UMKM dan dinas terkait agar masalah ini bisa diselesaikan lebih cepat,” tegasnya.

Program Pak Dewan Curhat Dong mendapat apresiasi positif dari para pelaku UMKM yang hadir. Mereka berharap program ini dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah dalam memberikan perhatian lebih terhadap masalah yang mereka hadapi, sehingga UMKM bisa berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disampaikannya dalam proses seleksi calon komisioner KPID Jatim yang berlangsung selama dua hari, Kamis-Jumat (30-31 Januari 2025).

Menurut politisi PKS ini, salah satu persoalan utama adalah masih banyaknya lembaga penyiaran di Jawa Timur yang belum memiliki izin resmi. Saat ini, terdapat hampir 400 lembaga penyiaran radio dan televisi di provinsi ini, namun tidak semuanya berstatus legal. "Salah satu tugas KPID nantinya adalah membantu dan memfasilitasi lembaga penyiaran agar bisa mendapatkan izin resmi sehingga mereka dapat beroperasi secara legal," ujar Agus.



**AGUS
CAHYONO:
KPID JATIM
HARUS LEBIH
EFEKTIF DI
TENGAH
KETERBATASAN
ANGGARAN**

Selain itu, ia menekankan bahwa peran KPID tidak hanya sebatas mengawasi, tetapi juga harus memberikan pendampingan kepada lembaga penyiaran agar mereka mampu menghadirkan konten berkualitas yang edukatif bagi masyarakat.

“Kita ingin media penyiaran tidak sekadar menyajikan hiburan, tetapi juga berperan dalam mendukung program-program pemerintah serta mencerdaskan masyarakat,” tambahnya. Agus juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk KPID Jatim. Dibandingkan dengan provinsi lain, anggaran yang diterima KPID Jatim tergolong kecil.



“Kalau di Jawa Tengah anggarannya hampir Rp4 miliar, di Jawa Barat sekitar Rp5 miliar, dan di Bali yang cakupannya lebih kecil mencapai Rp1,5 miliar. Sedangkan Jawa Timur dengan 38 kota/kabupaten hanya mendapat sekitar Rp1 miliar, yang sebagian besar habis untuk belanja operasional,” jelas legislator PKS ini. Ia pun berharap ada sinergi lebih kuat antara KPID Jatim, DPRD, dan dinas terkait seperti Diskominfo untuk mencari solusi terhadap tantangan ini.

“Kami di Komisi A akan berkoordinasi agar ada program atau kegiatan yang bisa disinergikan dengan lembaga penyiaran di daerah. Harapannya, ini dapat membantu KPID dalam menjalankan tugasnya lebih efektif meskipun dengan anggaran yang terbatas,” tutupnya. Dengan proses seleksi yang tengah berlangsung, nantinya akan dipilih tujuh komisioner terbaik dari 21 calon yang telah mengikuti tahapan wawancara. Nama-nama yang terpilih akan diajukan oleh Komisi A DPRD Jatim ke pimpinan DPRD untuk kemudian direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

**AGUS
CAHYONO
SOROTI
WACANA
WORK FROM
ANYWHERE,
MINTA
PEMERINTAH
LAKUKAN
KAJIAN
MENDALAM**

Wacana pemerintah untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mendapat tanggapan dari Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Agus Cahyono.

Ia menilai bahwa sebelum kebijakan ini diberlakukan, pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait efektivitas dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Agus Cahyono menekankan bahwa alasan utama wacana WFA adalah efisiensi. Namun, ia mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar akan menghasilkan efisiensi yang signifikan.

"Efisiensi ini harus dikaji secara mendalam. Jika manfaatnya tidak seberapa, tetapi justru menimbulkan dampak lebih luas, maka perlu dipertimbangkan kembali," ujarnya.



Ia menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara bertahap dan tidak menyeluruh agar tidak menimbulkan perubahan yang berdampak luas. Selain itu, Agus juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas jika WFA benar-benar diterapkan. Menurutnya, ada sektor-sektor yang tidak bisa diberlakukan sistem ini, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Sektor pendidikan dan kesehatan menyangkut layanan publik yang esensial. Masyarakat perlu mendapatkan layanan kesehatan yang optimal dan pendidikan yang berkualitas. Sektor ini tidak bisa diabaikan dalam upaya efisiensi,” tambahnya. Lebih lanjut, Agus juga menyoroti tren penurunan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk.

Menurutnya, jika sistem WFA diterapkan, dengan pola kerja tiga hari di kantor dan dua hari bekerja dari mana saja, ada kekhawatiran terkait efektivitas pelayanan. “Apakah dua hari kerja dari rumah itu bisa tetap memberikan pelayanan maksimal? Ini perlu dikaji ulang,” tegasnya.

Oleh karena itu, Agus Cahyono meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menggulirkan wacana WFA. “Sebelum wacana ini dijalankan, harus ada kajian yang matang agar tidak berdampak negatif pada pelayanan publik,” pungkasnya.

KHUSNUL KHULUK



ANGGOTA FRAKSI PKS DPRD PROVINSI JATIM



**DRS. H. M KHUSNUL
KHULUK**

KOMISI B (PEREKONOMIAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

PENJAGA PALANG PINTU KERETA API BERKURANG KARENA EFISIENSI ANGGARAN, KHUSNUL KHULUK DESAK PEMERINTAH CARI SOLUSI

Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Lumajang-Jember, Khusnul Khuluk, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan banyak penjaga palang pintu kereta api dirumahkan. Ia khawatir kondisi ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak memiliki penjaga.

Khusnul mendapati kabar tentang dampak efisiensi anggaran dari media yang menyebabkan pegawai honorer penjaga palang pintu kereta api dirumahkan. Menurut Khusnul, di Lumajang saja, sekitar 500 orang telah dirumahkan, dan kebijakan ini kemungkinan juga berdampak pada penjaga palang pintu yang sebelumnya dibiayai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.



“Harusnya pemerintah mencarikan jalan lain karena keselamatan warga tanpa palang pintu yang dijaga itu sangat berbahaya. Sudah sering terjadi kecelakaan di Jember maupun Lumajang,” ujar Khusnul. Ia menegaskan bahwa keberadaan penjaga palang pintu sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Jika penjaga dirumahkan, pemerintah harus segera mencari alternatif agar keamanan masyarakat tetap terjamin.

“Saya tahu betul bahwa kondisi ini bisa menimbulkan korban, maka harus segera dicarikan solusinya,” tegasnya. Khusnul memahami bahwa aturan saat ini tidak lagi memperbolehkan pemerintah merekrut tenaga honorer. Namun, ia menilai masih ada opsi lain, seperti mekanisme outsourcing atau skema pembiayaan khusus, agar penjaga palang pintu tetap bisa bekerja. “Jumlahnya tidak banyak, jadi anggaran yang dibutuhkan juga tidak besar. Tapi dampaknya luar biasa, karena menyangkut nyawa manusia,” jelasnya.

Dengan kondisi ini, Khusnul meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keselamatan warga. Ia berharap ada solusi konkret agar perlintasan kereta api tetap aman dan tidak menjadi ancaman bagi masyarakat. “Keselamatan warga harus jadi prioritas utama. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru mengorbankan nyawa rakyat,” pungkasnya.

Sejumlah perwakilan dari Forum Petani Garam Madura (FPGM) menggelar audiensi dengan Komisi B DPRD Jawa Timur pada Rabu (19/2/2025). Mereka meminta pemerintah daerah segera memberikan perlindungan hukum dan kepastian harga bagi petani garam, mengingat situasi yang masih merugikan mereka.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, mengungkapkan bahwa FPGM telah lama memperjuangkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Petani Garam sejak tahun 2019. Namun, akibat pandemi COVID-19, pembahasannya tertunda hingga kini. "Teman-teman FPGM meminta agar Perda Perlindungan Petani Garam segera diselesaikan. Insya Allah tahun 2025 ini akan terus diajukan dan dibahas. Apalagi, pemerintah pusat menargetkan Indonesia sudah swasembada garam pada 2027," kata politisi PKS itu.

**KHUSNUL
KHULUK SOROTI
IMPOR GARAM,
MINTA
PEMERINTAH
PERKUAT
PETANI LOKAL**

Selain itu, Khusnul menyoroti kebijakan larangan impor garam konsumsi yang sebenarnya sudah diinstruksikan sejak 2025. Namun, di lapangan masih ditemukan adanya garam impor yang masuk. "Teman-teman sepakat untuk mengawasi impor garam konsumsi. Kalau masih ada garam impor, ini perlu ditelusuri lebih lanjut," ujarnya. Khusnul juga menyoroti persoalan Harga Pokok Penjualan (HPP) garam yang hingga kini belum memiliki regulasi jelas, berbeda dengan komoditas lain seperti jagung yang sudah memiliki harga acuan. Kondisi ini menyebabkan harga garam berfluktuasi, dengan harga saat panen berkisar Rp780 hingga Rp800 per kilogram, sementara di luar musim panen bisa mencapai Rp4.000 per kilogram.

“Tanpa patokan harga pokok, petani sangat dirugikan. PT Garam seharusnya bisa menampung hasil produksi petani, tapi kenyataannya justru ada banyak pedagang perantara yang mengambil garam mereka dengan harga rendah,” tambahnya. Khusnul juga menyoroti lahan PT Garam di Gresik yang kini sudah tidak aktif dalam produksi, meskipun pabrik masih beroperasi. Oleh karena itu, Komisi B DPRD Jatim berencana melakukan kunjungan langsung untuk memastikan sumber pasokan garam yang digunakan.



Khusnul menegaskan perlunya peran pemerintah provinsi, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan dan Industri, dalam mendampingi petani agar bisa menghasilkan garam dengan kualitas yang lebih baik. Selama ini, mayoritas garam petani hanya masuk ke industri kecil seperti pengolahan ikan asin dan penyamakan kulit karena kadar natrium klorida (NaCl)-nya yang rendah. “Pemerintah harus hadir untuk memberikan pendampingan kepada petani agar kualitas garam mereka bisa memenuhi standar industri yang lebih luas. Jika ini tercapai, petani tidak lagi tergantung pada perantara yang sering merugikan mereka,” pungkasnya. Dengan adanya komitmen DPRD Jatim untuk memperjuangkan regulasi dan perlindungan bagi petani garam, Khusnul berharap nasib para petani garam Madura bisa lebih baik di masa depan.



**PETANI GARAM
MADURA
TERHIMPIT,
KHUSNUL
KHULUK DPRD
JATIM USULKAN
KUB SEBAGAI
SOLUSI**

Petani garam di Madura semakin terhimpit akibat tidak adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang mengatur harga garam. Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, mengusulkan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk membantu petani garam mendapatkan keuntungan yang lebih adil.

Khusnul menyampaikan, Harga Pokok Penjualan (HPP) garam hingga kini belum memiliki regulasi jelas, berbeda dengan komoditas lain seperti jagung yang sudah memiliki harga acuan. Kondisi ini menyebabkan harga garam berfluktuasi, dengan harga saat panen berkisar Rp780 hingga Rp800 per kilogram, sementara di luar musim panen bisa mencapai Rp4.000 per kilogram.

Menurut Khusnul, investasi industri garam yang besar di beberapa daerah menunjukkan bahwa sebenarnya sektor ini memiliki prospek cerah. "Informasi dari Forum Petani Garam Madura (FPGM), di Jawa Barat sudah ada industri-industri garam dengan investasi mencapai Rp1,5 triliun. Secara logika, jika sektor ini tidak prospektif, mengapa ada investasi besar?" ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah, khususnya di Jawa Timur, tidak membiarkan industri besar mendominasi tanpa kebijakan yang melindungi petani. "Kalau industri ini semakin besar, masyarakat tetap tidak akan menikmati hasilnya dan justru akan terdampak buruk," tambahnya.

Sebagai solusi, Khusnul yang merupakan perwakilan Fraksi PKS mengusulkan agar petani garam dibentuk dalam KUB dan difasilitasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di masing-masing kabupaten, terutama di Madura. "Sampang merupakan daerah dengan produksi garam terbesar di antara empat kabupaten di Madura. Jika ada BUMD yang menangani dan melibatkan KUB-KUB petani, maka masyarakat tetap mendapatkan keuntungan," jelasnya.

Dengan model ini, petani garam diharapkan dapat memiliki daya tawar yang lebih kuat di pasar dan mendapatkan harga yang layak. "Sekali lagi, ini bukan tentang industri besar, tetapi bagaimana masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari produksi garam mereka sendiri," pungkas Khusnul.

FRAKSI PKS JAWA TIMUR



Follow us



www.fraksipksjatim.id



[fraksipksjatim](https://www.facebook.com/fraksipksjatim)